



PROCEEDING KONFERENSI NASIONAL II

ISBN: 978-602-18912-1-6

BISNIS MEDIA DAN PERDAMAIAN:

*Mendorong Peran Bisnis dan
Media dalam Resolusi Konflik dan
Pengembangan Perdamaian*

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA**

13 NOVEMBER 2013

PROCEEDING KONFERENSI NASIONAL II

Bisnis, Media dan Perdamaian:

Mendorong Peran Bisnis dan Media dalam Resolusi
Konflik dan Pengembangan Perdamaian



13 November 2013

Diselenggarakan oleh:
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Yogyakarta

Proceeding Konferensi Nasional ini diterbitkan oleh
Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Penanggung Jawab : Asep Saepudin
Ketua : Aryanta Nugraha
Editor : Aryanta Nugraha
Nikolaus Loy

Alamat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Jl. Babarsari No. 2 Tambak Bayan, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 7852600
Email: icbmp2013@gmail.com

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii

Bisnis dan Perdamaian

- 1. Efektivitas Program Pemulihan UMKM Pasca Bencana Erupsi Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta** 1
Danang Yudhiantoro, Humam Santosa, Didit Herlianto
- 2. Peran Penting Jiwa Kewirausahaan dalam Mengembangkan Usaha baru Pasca Bencana** 23
Eny Endah Pujiastuti
- 3. Corporate Social Responsibility: Peluang dan Tantangan bagi Organisasi Bisnis** 45
Meilan Sugiarto
- 4. Jejaring UKM Berbasis Produk Sejenis di Era Global** 64
Supardal
- 5. Analisis Return dan Risiko Pada Investasi Saham** 85
Asih Marini Wulandari

Media dan Perdamaian

- 6. Management Strategic of Jawa Pos Groups: Regional Autonomy, Market and Media** 102
Yenni Sri Utami & Heroe Poerwadi
- 7. Peran Media dalam Proses Edukasi Politik Pemilih Pemula** 119
Adi Soeprpto, Susilastuti. DN, Basuki Agus Suparno

8. **Media dalam Pusaran Arus Konflik Politik Menuju Pemilu 2014** 151
Susilastuti. DN
9. **Mengkaji Peran Media Massa dalam Penanggulangan Terorisme** 169
Anik Yuniarti
10. **Model Manajemen Jaringan Teknologi Komunikasi yang Mendukung Operasional Sistem Pemerintahan dalam Pembangunan dan Penganggulangan Bencana Alam** 185
Edwi Arief Sosiawan
11. **Manajemen Komunikasi Bencana Gunung Sinabung 2010 Saat Tanggap Darurat** 217
Puji Lestari, Icha Dwi Putri Br Sembiring
Agung Prabowo, Arif Wibawa, Retno Hendariningrum

Peacemaking

12. **Understanding the Darfur Conflict** 248
Desy Nur Aini
13. **ASEAN's Soft Balancing Strategy Between the US and China: the Case of South China Sea Dispute** 272
Ludiro Madu
14. **Membangun Perdamaian dari Perspektif Perempuan** 290
Machya A. Dewi
15. **Strategi Perdamaian Positif Melalui Pendekatan *Peace Building*** 308
Suryo Wibisono
16. **Mengelola Konflik di Perbatasan melalui Optimalisasi Fungsi Pos Lintas Batas (PLB) di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.** 326
Iva Rachmawati & Fauzan

17. **Manga and Peace Education in Post-war Japan: How Reliable is Manga as an Instrument of Peace Education?** 362

June Cahyaningtyas

18. **Rebooting Australia-US Alliance: Australia's Interests and Stability in Asia Pacific Region** 374

Aryanta Nugraha



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Sertifikat



Diberikan Kepada :

Machya A. Dewi

sebagai

Pemakalah

Diselenggarakan Dalam Rangka

SEMINAR & KONFERENSI NASIONAL II ; BISNIS, MEDIA, DAN PERDAMAIAN

"Mendorong Peran Bisnis dan Media dalam Resolusi Konflik dan Pengembangan Perdamaian"

Yogyakarta, 13 November 2013

Dekan

Asep Saepudin, M.Si
NPY. 274019902201

MEMBANGUN PERDAMAIAN DARI PERSPEKTIF PEREMPUAN

Oleh

Machya Astuti Dewi

Pengajar Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta

Email: machdewi@yahoo.com

Abstract

In many cases women neglected in conflict resolution process, although they were victims and suffered from conflict. They excluded in peacekeeping, peacemaking and peace building process. And it is common situation that all conflict resolution process formulated from men's perspective. It is very important to reformulate conflict resolution and peace building based on women's perspective and women's interest. In fact, naturally women have significant role in managing crisis and conflict resolution. And women support for more realistic peace building actions, like children rehabilitation, access for water, maternal and children health instead of increasing military expenditure. Some actions needed to endorse women's role in peace building process and to create conflict resolution that accommodate women's interest. These actions can be done and supported by women parliament members, international agencies, and national governments.

Keywords: *peace, women, conflict resolution*

Pendahuluan

Di negara-negara yang mengalami konflik perempuan seringkali menjadi pihak lemah yang harus memikul tanggung jawab besar akibat konflik atau peperangan. *The National Organization for Women* mengemukakan bahwa 80-90% korban konflik-konflik bersenjata sejak Perang Dunia II adalah orang-orang sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Dalam situasi perang perempuan bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan

kelangsungan hidup keluarga sementara suami sedang berperang atau bahkan sudah tewas dalam peperangan. Setelah perang berakhir kaum perempuan masih berjuang (kadang-kadang seorang diri karena suaminya tewas dalam peperangan) untuk menghidupi anak-anak mereka di tengah kondisi ekonomi yang sangat sulit. Perempuan juga sering dijadikan sasaran atau senjata perang: diperkosa, disiksa atau dikawini secara paksa. Budaya militerisme yang berkembang selama konflik berlangsung telah mempertajam diskriminasi gender. Namun ironisnya ketika perundingan perdamaian untuk mengakhiri konflik dilakukan perempuan tidak dilibatkan. Akibatnya upaya penyelesaian konflik seringkali mengabaikan kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Salah satu contoh kasus resolusi konflik yang mengabaikan keberadaan perempuan adalah resolusi konflik di Irak. Secara statistik jumlah perempuan di Irak lebih banyak dari laki-laki, namun mereka tidak cukup dilibatkan dalam proses resolusi konflik. Akibatnya banyak aktivis perempuan kecewa dengan hasil yang dicapai, karena aspek-aspek kehidupan sehari-hari yang bersinggungan dengan tanggung jawab perempuan sebagai seorang ibu, semisal kebutuhan untuk pendidikan, keamanan dan kesehatan diputuskan tanpa mendengar suara perempuan dan mengakomodir kepentingan perempuan.

Contoh lain adalah kasus yang terjadi di Afghanistan. Pada waktu proses perundingan perdamaian dilakukan sedikit sekali perempuan yang dilibatkan. Ketika akhirnya konflik usai dan pemerintahan yang berdaulat berdiri maka Kementerian Perempuan kemudian juga didirikan. Sangat disayangkan kementerian tersebut tidak memiliki kekuasaan yang nyata dan sumber daya yang memadai untuk memajukan peran perempuan (Westcott, 2003).

Demikian pula konflik di Sudan. Perempuan Sudan tidak dilibatkan dalam perundingan perdamaian Utara-Selatan dan Darfur. Kondisi itu memicu protes dari para aktivis perempuan. Dua isu utama yang dilancarkan oleh para aktivis perempuan adalah pengembalian para pengungsi dan peningkatan kapasitas perempuan untuk terlibat dalam proses demokratisasi. Namun demikian Persetujuan Perdamaian Komprehensif tahun 2005 maupun Perundingan Perdamaian Darfur Mei 2006 kedua-duanya tidak memberikan jaminan bagi partisipasi perempuan dalam proses implementasi hasil perdamaian. Perempuan masih kurang terwakili di tingkatan lokal dan nasional dan bahkan komitmen untuk memberi kesempatan bagi perempuan dalam struktur pemerintahan formal tidak dipenuhi (International Crisis Group, 2006: i).

Tersembunyiya perempuan dalam urusan-urusan internasional, meluasnya pemahaman agama dan kultural yang meminggirkan perempuan, kurangnya perhatian internasional pada persoalan perempuan menjadi sebab terpinggirkannya perempuan dalam masalah-masalah internasional. Bahkan dalam kasus yang perempuan sebenarnya bisa menjadi aktor utama peristiwa internasional pun mereka jarang terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Contohnya adalah masalah pengungsi lintas batas yang sering memicu atau menjadi akibat dari konflik internasional. Meskipun sebagian besar pengungsi terdiri dari kaum perempuan, mereka tidak dilibatkan dalam proses negosiasi penyelesaian konflik. Bentuk-bentuk diskriminasi lain juga terjadi. Misalnya dalam kasus bekas Yugoslavia, genosida di Rwanda dan perlakuan terhadap kelompok Kurdi dan Syiah di Irak menunjukkan diskriminasi rasial sebagai penyebab konflik internasional. Diskriminasi berganda: ras, etnisitas dan seks yang diderita oleh perempuan belum dilihat sebagai bagian dari masalah internasional.

Fenomena tersebut mengindikasikan perlunya merumuskan ulang konsepsi mengenai resolusi konflik dan perdamaian dengan memperhatikan kepentingan perempuan. Berangkat dari realita pengabaian perempuan dalam proses resolusi konflik tulisan ini hendak membahas perlunya memperhatikan keberadaan dan kepentingan perempuan dalam proses resolusi konflik dan selanjutnya memberikan gagasan mengenai aspek-aspek penting yang semestinya diperhatikan untuk mewujudkan resolusi konflik yang ramah pada kepentingan perempuan.

Arti Penting Melibatkan Perempuan

Pengabaian perempuan dalam proses resolusi konflik internasional mengakibatkan konsep resolusi konflik dikembangkan dengan cara yang sempit. Simak misalnya pengertian konsep "keamanan kolektif" dalam hukum internasional yang cenderung diasumsikan sebagai upaya melindungi integritas kedaulatan negara secara fisik dan politis. Pengertian semacam ini menimbulkan tafsir bahwa upaya untuk mempromosikan perdamaian harus dilakukan dengan menggunakan kekuatan nasional.

Pemahaman atas konsep keamanan yang sempit akhirnya memunculkan ide untuk menggeser pemaknaan konsep keamanan secara lebih luas. Mantan Perdana menteri Australia, Gareth Evans pernah mempromosikan ide "keamanan kooperatif" sebagai pengganti keamanan kolektif. Pengertian keamanan kooperatif lebih luas daripada gagasan tentang keamanan militer karena mencakup persoalan ancaman kelangsungan hidup ekonomi sebuah negara, stabilitas politik dan harmoni sosial, kesehatan warga negara dan lingkungannya. Akan tetapi konsep keamanan yang kelihatannya lebih progresif ini masih tetap memusatkan perhatian pada perlindungan kedaulatan negara terhadap ancaman-ancaman dari luar dan aktivitas negara-negara lain. Konsep tersebut tidak mengarah pada

penjelasan bagaimana hubungan kekuasaan berlangsung dan bekerja di dalam sebuah negara dan bagaimana hubungan kekuasaan ini mempengaruhi aktivitas "eksternal" negara. Contoh pembatasan analisis keamanan yang bergender ini dapat dilihat dari buku yang ditulis Gareth Evans *Cooperating for Peace*, yang di dalamnya dikemukakan bahwa Perang Teluk (1990-1991) adalah contoh keberhasilan keamanan kolektif. Evans mengemukakan bahwa Bab VII Piagam PBB telah diaplikasikan secara tepat untuk memaksa Irak keluar dari Kuwait. Penilaian atas kesuksesan keamanan kolektif ini sebenarnya tidak proporsional karena belum memperhatikan dampak konflik yang diderita oleh perempuan. Bagaimanapun Perang Teluk diwarnai oleh kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan Irak dan Kuwait dan bahkan dalam tubuh angkatan bersenjata Amerika itu sendiri. Sanksi ekonomi yang diterapkan pada Irak setelah perang berakhir juga berdampak sangat buruk bagi perempuan dan anak-anak Irak, sementara itu militerisme di Amerika yang sebenarnya justru memiliki dampak langsung dan merugikan pada kehidupan perempuan tetap hidup. "Pembebasan" Kuwait juga menegaskan kembalinya pemerintahan otokratik yang cenderung mengabaikan suara perempuan.

Perlunya melibatkan perempuan dalam proses resolusi konflik telah ditegaskan dalam berbagai perangkat hukum internasional. Arti penting mencari penyelesaian konflik dinyatakan dalam pasal 2(3) Piagam PBB dan dapat pula disimak dalam beberapa resolusi Majelis Umum PBB. Sementara itu Bab VI Piagam PBB memberikan kerangka kerja bagi penyelesaian persengketaan dan Bab VII merujuk pada aksi yang berkaitan dengan ancaman perdamaian dan tindakan agresi. Pembuatan perdamaian bagi Dewan Keamanan (DK) beserta kekuasaan DK terdapat pada Bab VI dan Bab VII. Pengabaian perempuan dalam proses resolusi konflik mengabaikan resolusi

PBB 1325 tahun 2000 yang menegaskan pentingnya perempuan dalam resolusi konflik.

Dalam *blueprint* Agenda untuk Perdamaian tahun 1995 Sekjen PBB waktu itu Boutros Boutros-Ghali mencoba memperbaiki efektivitas aksi kerjasama dalam kerangka Piagam PBB untuk mencegah perselisihan, pencegahan konflik dan resolusi konflik. Rancangan tersebut disusun dengan memperhatikan isi Piagam PBB dan praktek perdamaian yang melibatkan organ PBB selama perang dingin untuk mengartikulasikan konsep-konsep yang berkaitan dengan diplomasi preventif, pembuatan perdamaian, penjagaan perdamaian dan penciptaan perdamaian. Tujuan diplomasi preventif adalah untuk menghindari meletusnya perselisihan dan meluasnya konflik dengan melakukan aksi pencegahan. Pembuatan perdamaian bertujuan untuk mengajak pihak-pihak yang bertikai melakukan kesepakatan perdamaian, terutama menggunakan proses sebagaimana diatur dalam Bab VI Piagam PBB. Penjagaan perdamaian melibatkan penggunaan militer, polisi dan personil sipil di bawah pengawasan PBB atau organisasi regional yang biasanya mendapatkan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat. Upaya membangun perdamaian dilakukan untuk mencegah berulangnya konflik dengan cara membangun struktur untuk memperkuat dan mempertahankan perdamaian. Berkait dengan upaya itu Dewan Keamanan (DK) PBB mengakui pentingnya peranan perempuan dalam mencegah konflik dan dalam upaya resolusi konflik serta pembangunan perdamaian dan juga menekankan pentingnya partisipasi dan pencegahan konflik, resolusi konflik dan dalam proses pembangunan perdamaian, serta menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua aspek pencegahan konflik.

Jaringan Studi Pembangunan tentang pengarusutamaan gender dalam Operasi Pendukung Perdamaian (*Peace Support Operation*)

menggarisbawahi pengakuan PBB bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan perdamaian dan resolusi konflik amatlah penting untuk mencari solusi konflik dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pengakuan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam mendukung perdamaian amatlah penting. Setidaknya ada dua isu yang berkaitan dengan perempuan dalam proses resolusi konflik, yaitu minimnya keterlibatan perempuan dalam arena proses pembuatan perdamaian dan gagasan mengenai perdamaian dan keamanan yang ramah perempuan yang akan menjadi sandaran bagi hukum internasional.

Ada beberapa alasan mendasar mengapa perempuan perlu dilibatkan dalam proses resolusi konflik. Pertama adalah karena perempuan memiliki tugas mulia sebagai penjaga perdamaian dunia. Di masyarakat mana pun perempuan memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak. Peran ini membantu mewujudkan perdamaian, karena perdamaian tidak lahir dengan sendirinya, tetapi diciptakan. Dalam masyarakat tradisional Afrika misalnya, budaya perdamaian ditanamkan pada anak melalui proses sosialisasi yang dilakukan dan diawasi oleh ibunya. Di Tanzania perempuan memainkan peran penting dalam menjaga perimbangan dalam masyarakat dengan membesarkan anak-anak agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Perempuan mendidik anak-anak mereka agar berperilaku baik, jujur dan menghargai orang lain. Dalam hal ini perempuan memainkan peran sebagai promotor harmoni dalam masyarakat dan budaya perdamaian. Berkat peran yang dimainkan perempuan sebagai ibu, budaya perdamaian dihayati oleh anak-anak dan menjadi dasar yang penting untuk membangun keluarga dan masyarakat yang penuh kedamaian.

Kedua, perempuan dapat memainkan peran penting dalam manajemen krisis dan resolusi konflik. Ketika konflik semakin meluas menjadi kekerasan bersenjata, upaya untuk mengundang pihak ketiga untuk

membantu resolusi konflik dan menenangkan pihak-pihak yang bertikai menjadi sangat diperlukan. Upaya mediasi semacam itu biasanya dilakukan oleh perempuan yang dikenal dan dihormati oleh banyak orang.

Di Afrika perempuan tertua dari suatu klan/marga dapat menemui klan musuh dan kemudian mendekati kelompok-kelompok yang bertikai untuk memaksa mereka melakukan introspeksi diri. Ketika kata-kata untuk membujuk mereka berdamai sudah tidak lagi manjur, kaum perempuan mengancam bahwa mereka akan bertelanjang. Karena ada rasa hormat pada perempuan, biasanya para pihak yang bertikai akan meletakkan senjata sebelum aksi telanjang dilakukan. Namun jika pihak yang bertikai belum juga meletakkan senjata, para perempuan tua benar-benar akan bertelanjang dan berjalan menuju tempat pertempuran sambil meneriakkan pesan-pesan perdamaian.

Di beberapa daerah di Somalia, perempuan seringkali berhasil menghentikan konflik inter dan antar etnis setelah mereka membentuk barisan dan menolak pergi sampai kedua belah pihak membatalkan niat berkonflik. Cara lain adalah dengan melakukan resolusi konflik melalui dialog dan perdamaian. Di tengah-tengah pertempuran terkadang perempuan dengan sengaja berdiri di depan laki-laki yang akan dibunuh agar pihak musuh membatalkan niat membunuh. Di sini perempuan menjadi penyelamat. Tindakan ini seringkali membuat pihak yang bertikai mencoba mengkompromikan perbedaan mereka dan memelihara hubungan baik.

Ketiga, perempuan juga memiliki peran penting dalam mengkonsolidasikan perdamaian. Dalam situasi konflik bersenjata, perempuan memainkan peran aktif dalam memulihkan perdamaian di Afrika, terutama dalam mencari resolusi konflik akibat pembunuhan seorang anggota kelompok suku. Biasanya seorang perempuan akan diundang sebagai

mediator dan dikirim ke keluarga korban. Jika mediasi berhasil dengan baik, maka dua keluarga yang berkonflik akan dapat mencari penyelesaian. Dalam situasi tertentu perempuan dapat mengadakan pertemuan dan memilih gadis tercantik yang siap menikah untuk menjalankan misi perdamaian. Jika misi itu berakhir dengan pernikahan gadis itu dengan salah satu tokoh pihak musuh, maka akan menjadi jalan untuk menengahi konflik tanpa kekerasan (Nwoye, 2012).

Resolusi Konflik yang Ramah Perempuan

Keterlibatan perempuan dalam resolusi konflik dapat memberikan nuansa yang berbeda karena mereka memiliki pendekatan yang lebih eksklusif tentang keamanan dan memperhatikan isu-isu sosial dan ekonomi yang biasanya cenderung diabaikan dalam proses resolusi konflik (International Crisis Group, 2006: 1).

Perdamaian semestinya mencakup penghapusan tatanan sosial masyarakat yang tidak adil. Selama ini dominasi dan kekerasan seringkali disebabkan oleh adanya tatanan masyarakat yang hirarkis, sebagaimana ditunjukkan dalam institusi militer yang sangat menekankan hubungan superior dan inferior di antara anggotanya. Penghapusan kekerasan di lingkup publik dan privat sangat penting untuk meraih perdamaian (Ho-Won Jeong, 2000: 83).

Konsep mengenai perdamaian mestinya dikembangkan dari kondisi keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keseimbangan ekologis. Keadilan dan demokrasi menjadi nilai-nilai transformasional untuk melakukan perubahan sosial. Basis dari upaya untuk meraih keadilan dan demokrasi adalah hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sekaligus sebagai sarana untuk mengakhiri rasisme, seksisme dan kerusakan ekologis.

Sistem keamanan dunia yang peduli pada perempuan mencakup seluruh warga dunia yang didasarkan pada gagasan keluarga luas seluruh umat manusia. Oleh karenanya kerangka konseptual mengenai keamanan harus diperluas definisinya sehingga mencakup advokasi perlindungan hidup dan perluasan kualitas hidup.

Perspektif perdamaian yang ramah perempuan berbeda dengan konsep keamanan tradisional. Konsep keamanan tradisional yang sarat dengan perspektif maskulin mengasumsikan perdamaian sebagai upaya pencegahan kekerasan melalui kontrol institusional. Keamanan merupakan pencegahan agresi dan pertahanan dalam negeri. Sebaliknya, agenda keamanan menurut perspektif feminis berupaya melindungi warga negara dari kekerasan oleh negara yang terorganisasi dan upaya pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. Keamanan juga bermakna keamanan kelangsungan hidup individual dan keamanan personal dalam berbagai hubungan sosial, termasuk keluarga (Ho-Won, 2000: 85).

Perdamaian mencakup penghapusan tatanan sosial masyarakat yang tidak adil. Oleh karenanya resolusi konflik untuk meraih perdamaian tidak cukup hanya diwujudkan dalam aksi gencatan senjata atau perundingan damai, tetapi juga harus mewujudkan dalam komitmen nyata untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, baik di level publik maupun privat. Makna keamanan bagi perempuan jauh lebih kompleks, bukan saja aman dari serangan bersenjata, tetapi juga keamanan kelangsungan hidup dan keamanan personal dalam berbagai hubungan sosial, termasuk keluarga.

Perempuan harus dan akan memberi sumbangan penting dalam membangun budaya perdamaian. Mereka dapat memberi masukan bagi praktek-praktek budaya yang positif dan praktek-praktek non-kekerasan

dengan cara: (1) terlibat dalam dialog dan pertukaran lintas budaya, (2) menjamin bahwa kreativitas tidak dibatasi oleh perbedaan etnis dan politik.

Perempuan dapat membuat upaya persetujuan perdamaian dan paska konflik menjadi lebih nyata, efektif dan praktis dengan melibatkan banyak tindakan, antara lain terlibat dalam pembicaraan perdamaian, rehabilitasi anak-anak yang berkait dengan kelompok-kelompok bersenjata, menjembatani pihak-pihak yang bertikai untuk mendiskusikan masalah-masalah bersama semisal akses untuk air bersih, dan mengadvokasikan prioritas anggaran yang lebih menekankan pelayanan sosial daripada untuk anggaran belanja militer (International Crisis Group, 2006: 1).

Dalam hal ini membangun perspektif keamanan yang sensitif gender sangatlah diperlukan. Ada empat prioritas perhatian untuk membangun perspektif kemanan yang sensitif gender: (1) keberlanjutan untuk menjamin bahwa dimensi-dimensi dan konsekuensi-konsekuensi ekologis harus dipertimbangkan dalam setiap pengambilan kebijakan, (2) ada jaminan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil tidak berakibat semakin merugikan kaum lemah, miskin, terdiskriminasi dan kaum yang termarginalisasi, (3) prinsip kesetaraan yang menjamin bahwa pembuatan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan kelompok yang akan dipengaruhi oleh kebijakan dan untuk mempromosikan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, sebagaimana memperhatikan representasi dari kelompok-kelompok minoritas dan tertindas, (4) adanya perlindungan untuk menghindari kerugian bagi pihak-pihak yang lemah (Mohini Giri, "Transforming Approaches to Conflict Resolution" dalam www.capwip.org/resources/.../giri1.pdf diakses 12 Januari 2013).

Pembangunan perdamaian dalam jangka panjang harus mencakup serangkaian upaya untuk mempromosikan perubahan sosial, politik dan

ekonomi, keadilan dan pengakuan pada hak-hak asasi manusia. Untuk itulah diperlukan seperangkat kebijakan yang dapat memperbaiki ketidakadilan dan pemilahan sosial, kebijakan yang secara spesifik memperhatikan kebutuhan perempuan dan memasukkan perspektif gender dalam rekonstruksi, rekonsiliasi dan keamanan.

Beth Woroniuk mengemukakan 6 pendekatan kritis dalam pembangunan perdamaian dari perspektif keamanan manusia:

1. Menggeser penekanan dari keamanan negara ke keamanan manusia, sehingga pemahaman negara sebagai basis utama masyarakat internasional dengan keamanan dan integritas teritorial sebagai perhatian utama bergeser ke ke keamanan orang. Hal ini akan membawa perempuan dan warga negara biasa masuk ke arena internasional.
2. Menekankan kembali kewajiban negara untuk menjamin keamanan dan perlindungan warga negara yang mencakup akses bagi aset-aset dan pekerjaan produktif.
3. Mengakui saling keterkaitan antar masyarakat dan bahwa banyak isu yang melintas batas negara. Banyak masalah yang tidak dapat dihentikan oleh batas-batas politik.
4. Mengakui pentingnya aktor non-negara, misalnya masyarakat sipil dan organisasi perempuan dan gerakan-gerakan lain bagi perdamaian dan melihat mereka sebagai penyumbang efektif dan punya tanggung jawab besar dalam mempromosikan keamanan manusia.
5. Mengakui bahwa hak-hak asasi manusia yang diabaikan dan hukum kemanusiaan dilaksanakan dengan baik dan pelanggaran hak-hak asasi

manusia diperhatikan dalam perjanjian perdamaian dan proses rekonsiliasi.

6. Pemahaman yang lebih besar mengenai kompleksitas keamanan, mendesak perlunya respon yang beragam yang memerlukan koordinasi dan kolaborasi di antara beragam aktor – dengan peningkatan kepercayaan pada penggunaan kekuatan persuasi dan negosiasi dibandingkan kekuasaan koersi dan kekuatan militer.

Apa yang Harus Dilakukan?

Untuk mewujudkan resolusi konflik yang ramah perempuan, maka perempuan harus dilibatkan dalam semua aspek pembicaraan pembuatan perundingan (*peace-making*) dan pembangunan perdamaian (*peace-building*). Cara paling efektif dan nyata agar perempuan mendapat perhatian dan prioritas adalah mendesak pemerintah dan badan-badan internasional mengambil langkah untuk menjamin agar perempuan secara langsung terlibat dalam resolusi konflik secara formal, bukan hanya menjadi anggota masyarakat yang tidak memiliki kekuatan.

Untuk mewujudkan perdamaian yang peduli pada kepentingan perempuan, berbagai organisasi dan pemimpin perempuan melakukan upaya keras. Organisasi perempuan untuk perdamaian dapat mempengaruhi masyarakat luas dan menjadi kekuatan utama untuk mengurangi kekerasan dan membangun lembaga publik yang demokratis dan partisipatif, terutama pada periode paska-konflik. Organisasi-organisasi semacam itu dapat dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan dan bekerja untuk membuat inisiatif perdamaian dan mengkomunikasikan pesan mereka pada para pemimpin nasional dan masyarakat internasional. Perjuangan mereka tidaklah mudah, mengingat keterbatasan dana, kemampuan dan akses yang terbatas untuk terlibat dalam mekanisme pembuatan keputusan, di samping

yang terutama adalah jumlah mereka yang minoritas di antara mayoritas laki-laki (International Crisis Group, 2006: i).

Peran negara ketiga yang netral sangatlah perlu untuk mewujudkan resolusi konflik berperspektif adil gender. Negara semacam Norwegia dapat mengambil peran ini. Tahun 2006 pemerintah Norwegia telah mencanangkan Rencana Aksi Implementasi Resolusi 1325. Rencana Aksi ini merupakan wujud keinginan pemerintah Norwegia untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses perdamaian di tingkat lokal maupun internasional. Norwegia dalam hal ini bekerjasama dengan pemerintah negara-negara Nordik yang lain, yaitu Finlandia, Swedia dan Denmark.

Beberapa aktor penting dapat terlibat dalam membangun perdamaian yang lebih memihak perempuan. Salah satunya adalah anggota legislatif perempuan. Setidaknya ada 4 hal yang dapat dilakukan oleh anggota legislatif perempuan untuk menyumbangkan ide perdamaian yang ramah perempuan:

1. Menyusun agenda, menentukan isi proses pembangunan perdamaian, siapa yang harus berpartisipasi dalam debat dan apa yang harus menjadi prioritas.
2. Sementara menentukan prioritas, isu-isu struktural dan ketidakadilan tidak boleh diabaikan.
3. Secara spesifik mengarahkan kebutuhan gender dalam pembangunan perdamaian dan rekonstruksi, dari pelayanan mendasar hingga rekonstruksi kerangka kerja legal yang lebih egaliter dan pembangunan kebijakan yang ditujukan untuk akses dan kontrol terhadap

sumberdaya untuk perempuan dan kaum termarginalisasi.

4. Mengarusutamakan gender dalam lembaga-lembaga terutama yang berkompeten di bidang keamanan, misalnya kepolisian dan tentara.
5. Melatih kembali dan mempromosikan kesadaran gender di kalangan laki-laki dan pemimpin laki-laki.
6. Memetakan dan mentransformasikan ranah politik. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kekuasaan representasional dapat digunakan untuk menjaga agenda tetap hidup dan bagaimana mempromosikan aksi kritis untuk membuat gagasan menjadi kenyataan. Hal ini memerlukan anggota legislatif perempuan untuk membangun perdamaian yang positif.
7. Membangun aliansi strategis dengan gerakan perempuan. Politisi perempuan dapat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh perempuan atau organisasi perempuan yang bekerja untuk perdamaian, terutama organisasi-organisasi yang berpartisipasi luas atau memiliki koneksi luas dengan masyarakat. Tentu saja membangun aliansi juga mencakup kerjasama dengan laki-laki sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Dukungan para aktivis perdamaian dan mereka yang memiliki komitmen terhadap kesetaraan dan keadilan gender juga penting untuk mengembangkan model peran kepemimpinan baru karena dari mereka lah biasanya lahir

pemikiran kritis dalam membangun perdamaian yang positif.

8. Menciptakan lingkungan perdamaian yang sensitif gender dengan mempromosikan kebijakan yang dapat mempermudah keikutsertaan perempuan aktivis perdamaian di barisan depan, dengan memfasilitasi masukan-masukan dari perempuan dalam proses parlemen, dengan mengkonsultasikan mereka dalam penentuan agenda dan mendapatkan dukungan mereka untuk mendukung perubahan politik.

Aktor lain adalah badan-badan internasional yang dapat mengambil langkah-langkah berikut:

1. Menciptakan jaringan untuk mendiseminasi upaya-upaya perdamaian di berbagai level, baik lokal, nasional dan internasional.
2. Melakukan lobi dengan organisasi-organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah perempuan di negara-negara lain terkait isu perlucutan senjata nuklir, pembatasan penjualan senjata dari negara-negara penghasil senjata, meningkatkan bantuan dan perdagangan yang adil untuk menciptakan perdamaian.
3. Inisiatif perempuan di lembaga internasional dapat mendorong formulasi kebijakan-kebijakan terkait pemeliharaan perdamaian, diplomasi preventif dan dalam semua mediasi perdamaian dan negosiasi.
4. Mendorong pertukaran pengalaman dalam inisiatif perdamaian, kunjungan antar-negara dan studi-studi perdamaian.

Sementara itu peran pemerintah tidak kalah penting dalam membangun perdamaian yang berperspektif perempuan. Peran yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memformulasikan kebijakan untuk tujuan perdamaian, kesetaraan dan resolusi konflik.
2. Menyusun kebijakan nasional untuk mempromosikan nilai-nilai pembangunan bangsa yang konstruktif di antara warga negara dan semangat perdamaian dengan memperkuat peran keluarga sebagai unit dasar.
3. Mendorong legislasi untuk mencegah praktek-praktek kekerasan, terutama kekerasan terhadap anak dan perempuan dan mendukung upaya NGO dan organisasi-organisasi masyarakat yang menaruh perhatian dalam isu ini.
4. Menyediakan akses informasi tentang perjanjian perdamaian dan anggaran belanja di bidang pertahanan.
5. Mendorong partisipasi perempuan di semua komite nasional dan internasional yang berkait dengan masalah-masalah keamanan, konflik bersenjata dan resolusi konflik (Nwoye, 2012).

Penutup

Pengalaman di berbagai negara telah menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian amatlah penting. Bukan saja karena perempuan merupakan pihak yang seringkali terabaikan suara dan kepentingannya, namun juga karena perempuan memiliki potensi menjadi aktor yang bisa memediasi konflik dan membangun perdamaian. Oleh

karenanya gagasan untuk merumuskan ulang konsepsi perdamaian yang lebih berpihak kepada perempuan perlu untuk terus dikembangkan.

Di tataran praktis, semua pihak yang terlibat dalam resolusi konflik dan upaya membangun perdamaian harus lebih memperhatikan kepentingan perempuan. Adalah hal bijak mengajak perempuan untuk berunding, serta mendengarkan apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh perempuan. Upaya membangun perdamaian yang komprehensif akan terwujud jika semua elemen masyarakat dilibatkan, termasuk melibatkan perempuan.

Daftar Pustaka

- Giri, Mohini, "Transforming Approaches to Conflict Resolution" dalam www.capwip.org/resources/.../giri1.pdf diakses 12 Januari 2013.
- Jeong, Ho-Won, *Peace and Conflict Studies*, Ashgate, Aldershot, 2000
- International Crisis Group, *Beyond Victimhood: Women's Peacebuilding in Sudan, Congo and Uganda*, Africa Report No 112, Juni 2006.
- Nwoye, Miriam Agatha Chinwe, *Role of Women in Peace Building and Conflict Resolution in African Traditional Societies: a Selective Review*, Department of Philosophy and Religious Studies, Kenyatta University, Nairobi Kenya, diakses 5 Desember 2012.
- Pisa-Lopez, Eugenia, "Women Politicians: a Global Force for Peace" dalam www.capwip.org/whatsnew/plenary3.htm diakses 5 Desember 2012.
- Wood, Mary dan Hilary Charlesworth, "Women and conflict resolution in international law", dalam *Development Bulletin* (53), 2000.
- Westcott, Kathryn, "Where are Iraq's women?" dalam news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3007381.stm diakses 5 Desember 2012.